

## Hotel Tentrem Gunakan Teknologi Ultra Violet C

**SEMARANG (KR)** - Dimulainya pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) di berbagai sisi kehidupan, pengelola Hotel Tentrem Semarang dan Yogyakarta menggunakan teknologi Ultra violet C (UVC) yang berfungsi mensterilkan udara, sehingga bebas dari virus dan bakteri.



KR-Budiono

**Irwan Hidayat**

Direktur Utama PT Hotel Candi Baru Irwan Hidayat, Selasa (6/10) di Semarang, mengatakan Hotel Tentrem tidak hanya melakukan penyesuaian pada prosedur standar operasional, tetapi juga melakukan pengamanan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan tamu.

"Ultra violet yang kami gunakan untuk mengamankan hotel dari bakteri adalah jenis ultra violet jenis C (UVC). Sinar UVC ini dapat mengubah struktur materi genetik virus dan mencegah perkembangannya," tutur Irwan Hidayat.

Irwan mengatakan, untuk mendatangkan teknologi ultra violet C pihaknya harus mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp 3,9 miliar. Lampu UVC dapat digunakan selama 15.000 jam. Setelah itu lampu harus diganti dengan yang baru.

Menurut Irwan Hidayat, UVC untuk mensterilkan permukaan dan udara sudah terakui, sehingga banyak diterapkan di Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan untuk mensterilkan alat medis.

Penerapan teknologi UVC di Hotel Tentrem adalah dengan menempatkannya pada central Air Handling Unit & setiap Fan Coil Unit yang ada disetiap kamar dan ruang2 lain. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan udara dingi yang keluar dari AC.

"Kami benar-benar mengikuti peraturan New Normal dengan ketat. Setiap hari kami melakukan sterilisasi semua kamar tidur dan ruang-ruang lain yang ada di Hotel Tentrem di Yogyakarta dan di Semarang, termasuk kewajiban untuk menggunakan masker bagi setiap pengunjung," jelasnya.

Selama pandemi, Hotel Tentrem hanya menerima tamu maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada. "Kenyamanan, keselamatan dan ketentraman tamu dan karyawan merupakan prioritas utama kami. Kami berharap tamu tetap dapat menikmati saat-saat yang menenangkan selama berada di Hotel Tentrem dengan rasa aman," ujar Irwan Hidayat. **(Bdi)**

## Tanggapan Fraksi Terhadap Raperda PDAM dan Renbang Industri



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

**GROBOGAN (KR)** - DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna pemandangan fraksi tentang dua Raperda yang diajukan bupati yaitu Raperda Perusda Purwa Tirta Dharma dan Rencana Pembangunan (Renbang) Industri Kabupaten Grobogan tahun 2020-2040, Senin (5/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir HM Nurwibowo MSi, dihadiri Pjs Bupati Grobogan Haerudin SH MH beserta jajarannya, dan segenap unsur Forkopimda.

Tujuh fraksi yang ada, yaitu PDIP, PKB, PPP, Hanura, Gerindra, Karya Sejahtera, dan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya, memberi tanggapan hampir sama terhadap dua Raperda tersebut. Seperti Fraksi PDIP, lewat juru bicara Asih Wiji Astuti SPd, bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penambahan modal BUMD, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam Raperda

yang diajukan bupati, modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma ditetapkan Rp 230 miliar, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap melalui penyertaan modal. "Fraksi kami mengusulkan adanya tambahan 1 ayat, yaitu ayat (7) yang berbunyi, Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis," ujarnya.

Sedangkan Raperda Renbang Industri, Fraksi PDIP mempertanyakan dasar hukum terkait dengan judul Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2040, dan mengapa tidak tahun 2021-2041. Hal sama disampaikan Fraksi PPP lewat juru bicara Budi Prihdiyono, apa dasarnya menetapkan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Purwa Tirta Dharma sebesar Rp 230 miliar. Sedangkan Raperda Renbang Industri 2020-2040, Fraksi PPP menanyakan berapa jumlah industri genteng dan dimana lokasinya.

Fraksi PKB lewat juru bicara Mansata Indah Maratobna MSi mempertanyakan perubahan bentuk badan hukum Perusda Air Minum Purwa Tirta Dharma baru dilakukan sekarang. Selain itu mengapa Perusda tersebut tidak berani berinovasi mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroada. Tentang Raperda Renbang Industri, Fraksi KPB minta kepada bupati memperhatikan area atau daerah yang akan dijadikan kawasan industri. Jangan sampai Raperda Pembangunan Industri ini dibuat hanya karena regulasi.

Fraksi Gerindra, lewat juru bicara Firman Tri H Sfarm Apt, minta rincian modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa

Tirta Dharma yang ditetapkan sebesar Rp 230 miliar. Fraksinya juga menanyakan berapa jumlah penyertaan modal yang diterima PDAM sampai saat ini. Tentang Raperda Renbang Industri 2020-2040, Fraksi Gerindra mengusulkan industri unggulan selain makaroni, mie, dan produk sejenisnya serta industri kripik, kripik, peyek, dan sejenisnya, juga makanan ringan yang bahan bakunya jagung, kedelai, dan pisang.

Sedangkan Fraksi Hanura lewat juru bicara M Qanieqna BMA SH, menanyakan kenapa laba perusa-

haan akan diatur lebih lanjut oleh bupati. Pasalnya, dalam ketentuan Pasal 39 Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma sudah diatur adanya jumlah prosen sebagaimana dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Tentang Raperda Renbang Industri 2020-2040, Fraksi Hanura menanyakan dimana lokasi rencana membangun pilot project pakan ternak berbasis sumber daya lokal di sentra produksi tahun 2020-2024, dan leading sektornya siapa. **(Tas)**



KR-M Taslim

**Rapat paripurna pemandangan umum Fraksi DPRD Grobogan tentang dua raperda yang diajukan bupati.**

## Kades Sepakat Netral dalam Pilbup

**PURWOREJO (KR)** - Kepala desa (kades) di Kabupaten Purworejo sepakat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) tahun 2020.

Mereka mendeklarasikan netralitas itu bersama dengan kegiatan 'Sosialisasi Netralitas Kades' yang digelar dalam empat gelombang hingga Selasa (6/10). "Sosialisasi ini sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Purworejo," kata Koordinator Di-

visi Hukum Humas dan Datin Bawasl Purworejo Rinto Hariyadi, Selasa (6/10). Deklarasi para kades ini disaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Purworejo Agus Ari Setiyadi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purworejo Zaenal Abidin, dan Penyidik Sentra Gakkumdu

Iptu Bruyi Rohman Prakoso. Ketiganya hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dikatakan, dalam deklarasi itu para kades menyatakan bersikap dan akan menjaga netralitas. Tidak akan melakukan tindakan dan atau perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon). Para Kades juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan dan pen-

endalian Covid-19 di wilayah masing-masing. Menurut Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq, ada potensi pidana dalam pemilihan yang bisa menjerat kades dalam undang-undang pemilihan. Yani pasal 71 ayat (1) saat kades melakukan tindakan dan/perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Sosialisasi yang digelar Bawaslu ini menurut Agus Ari Setiyadi, sangat bagus sebagai bentuk edukasi. **(Nar)**

## Buruh

Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan wilayah lainnya.

Menyikapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, pengesahan UU Cipta Kerja untuk memperluas penyediaan lapangan kerja, bukan memperluas pemutusan hubungan kerja (PHK). "Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan UU Cipta Kerja rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja ini justru memperluas penyediaan lapangan kerja," katanya.

Menaker membuat surat terbuka untuk kalangan serikat pekerja dan menegaskan, tujuan utama RUU Cipta agar pemulihan ekonomi tercapai. Untuk itu pemerintah melakukan dua hal penting, pertama mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah. Kedua, segera menyusun peraturan pelaksanaan UU

Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di bawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan.

Selain itu ia menegaskan poin-poin positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Di antaranya dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK), UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.

Dedi Sudrajat dari KSPI Banten menjelaskan, masih ada cara yang bisa diperjuangkan para buruh meskipun saat ini UU Cipta Kerja Omnibus Law sudah disahkan DPR. Caranya mendorong Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih menahan diri untuk tidak melakukan aksi. Ganjar memahami keputus-

an tersebut tak memberi kebahagiaan banyak pihak, khususnya kalangan buruh. Untuk itu Gubernur berharap semua pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.

"Mari kita bertemu, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua bisa mengerti. Komunikasi di awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Saya mengapresiasi," tutur Ganjar.

Ia mendukung langkah kemungkinan adanya pengajuan gugatan *judicial review* terhadap UU Cipta Kerja. Dengan langkah tersebut bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik, sehingga membuka kebuntuan berkomunikasi. Masyarakat yang kecewa bisa membawa hak-haknya secara konstitusional untuk mendapatkan ruang yang bagus.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Ki Prof Dr Cahyono Agus menyatakan, janji pemerintah kluster pendidikan dan kebudayaan akan dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja, ternyata tak ditepati

Sambungan hal 1

sampai RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Melihat realita itu, PKBTS tetap menolak klaster pendidikan dan kebudayaan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja.

"Kami akan memperjuangkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.

Apabila pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja, berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan.

Menurut Cahyono Agus, hal itu jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa dan pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang menjelaskan tentang pendidikan yang berhak untuk diambil setiap warga negara, tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar, kewajiban negara dalam membiayai pendidikan serta mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. **(Fu/Bdi/Ati/Jay)-d**

## Meningkat,

Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan gugus tugas di provinsi lain untuk menyampaikan sosialisasi protokol kesehatan pada warganya. Termasuk saat rombongan wisatawan datang ke DIY sesuai kebijakan di DIY.

Sementara itu, kasus sembuh bertambah kembali sebanyak 40 kasus sehingga total kasus sembuh di DIY menjadi 2.163 kasus. Sedangkan kasus positif Covid-19 dari hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY bertambah 20 kasus maka total kasus positif menjadi 2.833 kasus.

Sambungan hal 1

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Corona Berty Murtiningsih mengatakan terdapat tambahan 40 kasus sembuh. Tambahan kasus sembuh ini sebagian besar berdomisili di Sleman sebanyak 20 orang, Bantul sebanyak 12 orang, Kulonprogo dan Gunungkidul masing-masing 4 orang.

Di Kabupaten Magelang, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Selasa (6/10) telah melaksanakan 8988 swab masif. Dari sebanyak itu, ditemukan 70 orang yang terkonfirmasi positif. Beberapa di antaranya, dirawat dirumah sakit dan mayoritas menjalani isolasi mandiri. **(Ria/Ira/Bag/Mak)-d**

## Estetika

pemerintah dengan berbagai penataan yang mulai digarap. Keberadaan tiang-tiang pancang untuk sarana infrastruktur pun seharusnya dibenamkan ke dalam tanah. Seperti sistem ducting yang tengah dikerjakan untuk kawasan Tugu Pal Putih, harapannya mampu dijadikan percontohan di kawasan lain. Sehingga kelak tidak ada lagi kabel melintang di atas yang selama ini mengganggu estetika kota.

Danang berharap, penataan sistem ducting di kawasan Tugu pun dilanjutkan untuk seluruh jalan protokol di Kota Yogya. Tentunya, hal itu perlu jalinan kerja sama pembangunan dengan Pemda DIY.

Wailkota Yogya Haryadi Suyuti, menga-

takan pihaknya menaruh perhatian untuk menjaga estetika Yogya. Tidak hanya sistem ducting yang akan dikembangkan, keberadaan papan reklame luar ruang pun akan ditata sedemikian rupa. Kawasan Malioboro saat ini sudah tidak ada reklame melintang serta menutupi fasad bangunan. Hal sama juga akan diterapkan pada kawasan sumbu filosofis maupun kawasan cagar budaya.

Haryadi menilai, setiap aktivitas penataan wilayah selalu diikuti dengan pendekatan humanis. Hal ini agar masyarakat di wilayah dapat turut serta terlibat dan tumbuh rasa memiliki sehingga kelak mampu merawat hasil pembangunan.

Sambungan hal 1

"Semangat kebersamaan ini yang akan terus kami bangun. Semua elemen harus bisa terlibat mulai dari komunitas warga, korporasi, kampus, kampung hingga pemerintah kota," katanya.

Diakuinya, untuk kembali bangkit di masa pandemi bukan perkara mudah. Apalagi hampir semua daerah mengalami persoalan serupa. Akan tetapi dirinya optimis masyarakat Yogya dengan kearifan lokalnya mampu lebih cepat bangkit dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Oleh karena itu, di samping kebersamaan dan gotong royong, kedisiplinan semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan juga merupakan faktor penting. **(Dhi)-f**

## Masyarakat

Masyarakat utopia tidak lebih menjadi mimpi yang mengontrol praktik-praktik kehidupan dengan harapan bahwa berbagai praktik tersebut dapat mengantarkan kita ke dalam hidup masyarakat yang diangankan. Hal yang diangankan utopia juga sudah kita ketahui bersama, seperti masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang berkeadilan.

Namun, berbeda pula antara dunia modern dan posmodern. Dalam dunia posmodern, yang dominan adalah pengakuan terhadap distopia. Masyarakat hidup dalam ketidakteraturan. Masyarakat hidup dalam kerancuan antara masa lalu dan masa depan. Masyarakat hidup dalam rasa beragam di satu sisi dan sekularitas di sisi lain.

Masyarakat hidup dalam pengakuan terhadap hukum dan sekaligus keinginan untuk melanggarnya. Masyarakat

hidup dalam sandera kepentingan individu dan masyarakat.

Juga, masyarakat hidup dalam kekacauan referensial dan nilai, baik pada tataran penandaan ikonik, indeksial, maupun simbolik. Mana yang buruk dan baik menjadi tidak jelas batasnya. Mana yang benar dan salah mengalami politisasi kepentingan sesuai dengan selera dan kekuasaan dalam segala levelnya.

Menilik berbagai kemungkinan tersebut, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa masyarakat kita bukan masyarakat distopia. Suatu masyarakat dalam percampuran dan silang sengkabut yang mengancam harmoni (utopia). Itulah sebabnya, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat distopia. Pertama, kekacauan dalam arti yang sesungguhnya. Masyarakat terjebak ke dalam pertentangan yang bisa jadi bersifat fisik.

Dalam skala kecil dan sporadis hal ini telah terjadi di mana-mana.

Belakangan, hal yang paling menonjol dari jejak distopia adalah politisasi/politik identitas. Kekacauan referensi ikonik, indeksial dan simbolik dimanipulasi, terutama atas nama agama (juga etnis dan ras). Sehingga kekacauan tidak hanya berdimensi fisik, tetapi yang lebih berbahaya adalah kekacauan pengetahuan.

Belajar dari sejarah, kita tahu bahwa banyak negara/kerajaan yang hancur dan berganti rezim dari waktu ke waktu. Sebuah negara, atau kerajaan, bahkan hingga masa-masa puncaknya, tidak berjalan dalam utopia, tetapi dalam distopian. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Majapahit atau Sriwijaya adalah sebuah negara

yang ideal yang kita perlu meniru kejayaan tersebut. Kejayaan negara kerajaan besar tersebut berjalan secara inheren dengan kedistiopannya. Kenyataannya, negara-negara tersebut tidak dapat bertahan dan hancur.

Kemungkinan kedua yang lebih positif adalah kekacauan dilihat sebagai ketegangan yang menantang untuk ditaklukkan. Berbagai upaya kreatif yang kita kerjakan adalah upaya-upaya penaklukan terhadap kekacauan dan ancaman ketegangan tersebut. Sebenarnya, saya berharap mungkin ini yang sedang terjadi. Kita dalam posisi sedang berlomba-lomba untuk mengalahkan ketakutan, ketegangan, dan kekacauan. Jika itu yang terjadi, masyarakat distopia yang sedang kita jalani, masih banyak harapan optimis ke depan.

*(Penulis, Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM)-d*



## Prakiraan Cuaca Rabu, 7 Oktober 2020

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95